



Badan Keuangan dan Aset Daerah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaan-Nya, Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang selama Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sekaligus sebagai implementasi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja organisasi, capaian kinerja pejabat administrator, serta realisasi anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang selama Triwulan II Tahun 2026. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2026, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang terus berupaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, penguatan sistem administrasi pemerintahan, serta peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya, seluruh jajaran BKAD Kota Kupang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengendalian, serta informasi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kupang, 3 Juli 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kupang

Jackson Jimmy A. Tunliu, SE.,MM

Pembina Tk. I

Nip. 19750405 200501 1 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 sebagai perwujudan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembankan.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, BKAD mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan. Untuk merealisasikan tugas tersebut, BKAD selama Triwulan II Tahun 2026 telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II tahun 2026. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang .Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan unsur pelaksana pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. BKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan, dalam melaksanakan tugasnya BKAD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan administrasi daerah di bidang keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Organisasi dan Personalia

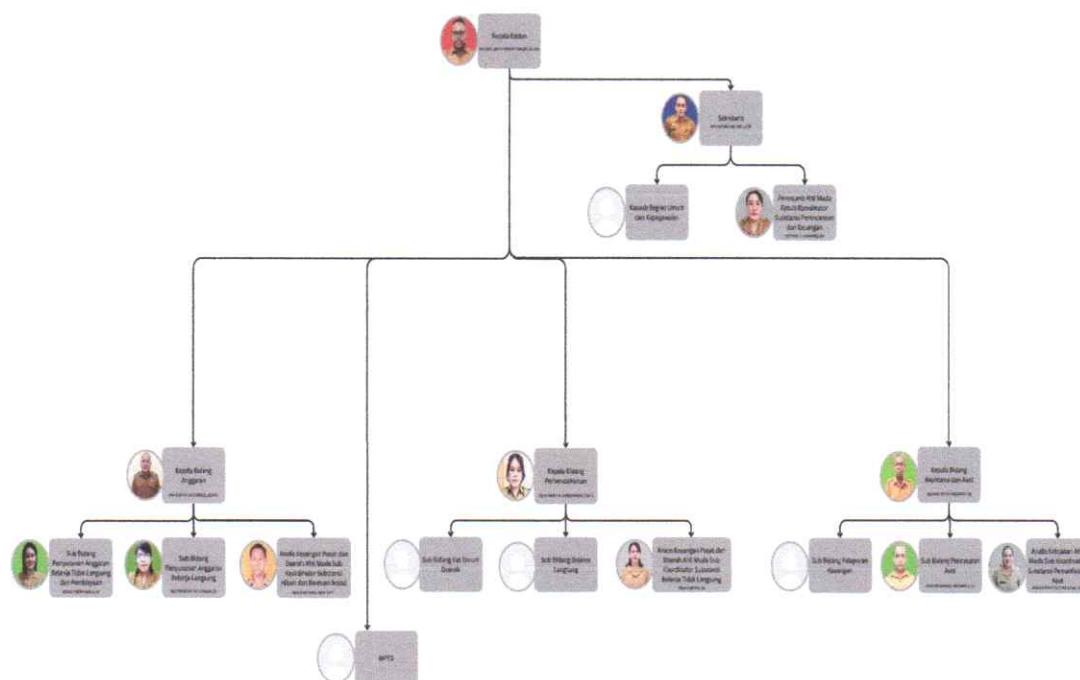
Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang yakni sebagai berikut :

- Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan.
- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan.
- Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan, anggaran belanja langsung serta hibah dan bantuan sosial.
- Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kas umum daerah, belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- Bidang Akuntansi & Aset mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelaporan keuangan, pencatatan dan pemanfaatan aset.

Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Struktur Organisasi BKAD Kota Kupang

*PERWALI Kota Kupang No. 60 tahun 2021



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

1.3. Sistematika Penulisan

- Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
- Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan rencana strategis, serta penetapan kinerja, dan program kegiatan untuk Triwulan II Tahun 2026.
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja, program dan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai akhir Triwulan II Tahun 2023, kendala dan rekomendasi.
- Bab IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan Laporan Kinerja Triwulan II dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026, Kepala Badan bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran strategis yakni “Optimalisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang berkualitas, bersih dan berwibawa dalam kerangka pemerintah yang berdaya guna”. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sesuai dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan administrasi daerah di bidang keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Renstra dapat dijabarkan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Tujuan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi Anggaran Daerah2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang berkualitas, bersih dan berwibawa dalam kerangka Pemerintahan yang berdaya guna; |
| Sasaran | : | <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan. |
| Indikator Kinerja | : | <ol style="list-style-type: none">1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan;2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. |

Sehubungan dengan pencapaian indikator kinerja diatas, penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya diarahkan untuk:

1. Peningkatan sistem perencanaan dan kerjasama yang cermat, akurat dan akuntabel serta pengelolaan reformasi birokrasi yang terkoordinasi dengan baik;
2. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, dan kerumahtanggaan serta kehumasan dengan baik dan optimal; dan
3. Pelaksanaan pengendalian pengawasan kinerja dan keuangan yang efektif.

2.2. Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Skor Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	12,03
		- Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	16
		- Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan	13,70
		- Nilai Penyerapan Anggaran	14,70
		- Nilai Kondisi Keuangan Daerah	13,66
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis digital	- Nilai Aspek Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100
		- Nilai Aspek Realisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	77,50
		- Nilai Aspek Lingkungan Strategis Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100

3	Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah	- Persentase Aset Tanah yang Bersertifikat	58
---	---	--	----

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2026

Sumber data: Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Penetapan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang Tahun 2026 merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Perjanjian kinerja ini menetapkan sasaran strategis yang terukur melalui sejumlah indikator dan target capaian. Salah satu fokus utama adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang ditunjukkan melalui skor kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan target 12,03, nilai pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sebesar 16, indeks transparansi pengelolaan keuangan sebesar 13,70, nilai penyerapan anggaran sebesar 14,70, serta nilai kondisi keuangan daerah sebesar 13,66. Indikator-indikator tersebut mencerminkan pentingnya konsistensi perencanaan, ketepatan alokasi anggaran, keterbukaan informasi, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta kesehatan fiskal daerah.

Selain itu, penetapan kinerja juga menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis digital. Hal ini diwujudkan melalui indikator nilai aspek implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan target 100, nilai aspek realisasi elektronifikasi sebesar 77, 50, serta nilai aspek lingkungan strategis elektronifikasi yang juga ditargetkan mencapai 100. Upaya ini menunjukkan dorongan kuat menuju transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan.

Di sisi lain, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian penting dengan sasaran meningkatnya aset yang produktif dan bernilai tambah. Hal ini diukur melalui persentase aset tanah yang telah bersertifikat dengan target sebesar 58 persen. Pencapaian target ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas aset daerah sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatannya. Secara keseluruhan, penetapan kinerja ini menggambarkan arah kebijakan yang terintegrasi dalam

mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Selanjutnya, Perjanjian Kinerja 2026 pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 adalah dokumen yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai sebagai wujud komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi. Perjanjian ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat, baik dalam aspek pengelolaan tata kelola yang efektif, efisien, ekonomis, akuntabel, dan transparan, maupun dalam penyediaan dokumen perencanaan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, dan target capaian ditampilkan pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sekretariat			
Sekretaris			
1	Tersedianya Dokumen Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan			
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator / Pengawas Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026

Penetapan kinerja pada bagian ini menggambarkan pembagian peran dan tanggung jawab berdasarkan jabatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pada tingkat Sekretaris, sasaran strategis yang ditetapkan adalah tersedianya dokumen umum dan kepegawaian perangkat daerah. Sasaran ini menjadi penting karena dokumen umum dan kepegawaian merupakan dasar administrasi yang menunjang kelancaran operasional organisasi serta mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel. Untuk mengukur capaian tersebut,

digunakan indikator kinerja berupa jumlah dokumen umum dan kepegawaian perangkat daerah yang berhasil disusun atau disediakan, dengan target yang ditetapkan sebanyak 12 dokumen. Target ini mencerminkan ekspektasi terhadap ketersediaan dokumen yang lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada jabatan Perencana Ahli Muda yang juga bertindak sebagai Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan, ditetapkan sasaran strategis berupa tersedianya dokumen perencanaan dan keuangan perangkat daerah. Sasaran ini berperan penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan secara sistematis, terarah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah dokumen perencanaan dan keuangan perangkat daerah yang dihasilkan, dengan target capaian sebanyak 12 dokumen. Target tersebut menunjukkan komitmen untuk menghasilkan dokumen perencanaan dan keuangan yang berkualitas, komprehensif, serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara keseluruhan, penetapan kinerja ini menegaskan pentingnya ketersediaan dokumen sebagai instrumen utama dalam mendukung administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Berikutnya, Perjanjian Kinerja 2026 pada Bidang Akuntansi dan Aset 2026 adalah bentuk komitmen kinerja pejabat administrator dan pengawas dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Perjanjian ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, serta target yang harus dicapai untuk memastikan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan laporan barang milik daerah disusun sesuai aturan yang berlaku. Rincian sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, dan target capaian ditampilkan pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Bidang Akuntansi dan Aset			
Kepala Bidang Akuntansi dan Aset			
1	Terwujudnya Pelaporan Keuangan sesuai Aturan yang Berlaku	- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang	12 Laporan

2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang	12 Laporan
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset			
1	Tersedianya Dokumen Optimalisasi Barang Milik Daerah	- Jumlah Dokumen Pemanfaatan Aset	12 Dokumen
		- Jumlah Dokumen Pemindahtanganan Aset	12 Dokumen
		- Jumlah Dokumen Penghapusan Aset	12 Dokumen
		- Jumlah Dokumen Pengamanan Aset	12 Dokumen
Kepala Sub Bidang Pencatatan Aset			
1	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan
		- Jumlah Laporan Standar Satuan Harga	12 Laporan
Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan			
1	Tersedianya Laporan Keuangan	- Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator / Pengawas Bidang Akuntansi dan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026

Penetapan kinerja pada Bidang Akuntansi dan Aset menegaskan peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel. Pada tingkat Kepala Bidang Akuntansi dan Aset, sasaran strategis difokuskan pada terwujudnya pelaporan keuangan yang sesuai aturan, yang diukur melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan target sebanyak 12 laporan. Selain itu, juga ditetapkan sasaran terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, yang diukur melalui penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota

Kupang dengan target 12 laporan. Hal ini menunjukkan komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas baik dari sisi keuangan maupun aset daerah.

Pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset, sasaran strategis diarahkan pada tersedianya dokumen optimalisasi barang milik daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu jumlah dokumen pemanfaatan aset, dokumen pemindahtanganan aset, dokumen penghapusan aset, serta dokumen pengamanan aset, yang masing-masing ditargetkan sebanyak 12 dokumen. Ini mencerminkan upaya optimal dalam mengelola siklus aset daerah secara menyeluruh, mulai dari pemanfaatan hingga pengamanan.

Selanjutnya, pada Kepala Sub Bidang Pencatatan Aset, sasaran strategis yang ditetapkan adalah tersedianya dokumen penatausahaan barang milik daerah. Indikator kinerja yang digunakan meliputi jumlah laporan Barang Milik Daerah dan jumlah laporan standar satuan harga, masing-masing dengan target 12 laporan. Hal ini menunjukkan pentingnya pencatatan yang tertib dan standar harga yang jelas dalam mendukung pengelolaan aset yang akurat.

Sementara itu, pada Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan, sasaran strategis berfokus pada tersedianya laporan keuangan, dengan indikator jumlah laporan keuangan yang ditargetkan sebanyak 12 laporan. Secara keseluruhan, penetapan kinerja ini mencerminkan upaya terintegrasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang transparan, tertib administrasi, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas pemerintahan.

Berikutnya, Perjanjian Kinerja 2026 pada Bidang Anggaran 2026 adalah wujud komitmen pejabat administrator dan pengawas dalam memastikan pengelolaan anggaran pemerintah daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Perjanjian ini mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai dalam penyusunan dokumen anggaran, baik anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan, maupun hibah dan bantuan sosial. Melalui perjanjian ini, diharapkan proses penyusunan dan pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Rincian sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, dan target capaian ditampilkan pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Bidang Anggaran			
Kepala Bidang Anggaran			
1	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran sesuai Aturan yang Berlaku	- Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah sesuai Aturan yang Berlaku	12 Dokumen
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan			
1	Tersedianya Dokumen Anggaran BTL dan Pembiayaan	- Jumlah Dokumen Anggaran BTL dan Pembiayaan	12 Dokumen
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah dan Bantuan Sosial			
1	Tersedianya Dokumen Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial	- Jumlah Dokumen Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial	12 Dokumen
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung			
1	Tersedianya Dokumen Anggaran Belanja Langsung	- Jumlah Dokumen Anggaran Belanja Langsung	12 Dokumen

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator / Pengawas Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026

Tabel diatas menjelaskan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Bidang Anggaran dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan anggaran yang sesuai aturan, yang diukur melalui tersusunnya dokumen anggaran pemerintah daerah secara tepat dan lengkap. Pada tingkat sub bidang, capaian kinerja difokuskan pada ketersediaan dokumen anggaran berdasarkan jenisnya, meliputi dokumen anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan, dokumen anggaran hibah dan bantuan sosial, serta dokumen anggaran belanja langsung. Setiap indikator kinerja tersebut ditetapkan dengan target yang sama, yaitu sebanyak 12 dokumen, yang mencerminkan konsistensi dalam penyusunan dokumen anggaran sepanjang

periode pelaporan. Hal ini menunjukkan komitmen Bidang Anggaran dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, Perjanjian Kinerja 2026 pada Bidang Perbendaharaan 2026 adalah bentuk komitmen pejabat administrator dan pengawas dalam mewujudkan pengelolaan perbendaharaan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku. Melalui perjanjian ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, serta mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Rincian sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, dan target capaian ditampilkan pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Bidang Perbendaharaan			
Kepala Bidang Perbendaharaan			
1	Terwujudnya Pengelolaan Perbendaharaan sesuai Aturan yang Berlaku	Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan sesuai aturan yang berlaku	12 Dokumen
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Belanja Tidak Langsung			
1	Tersedianya Dokumen Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Belanja Tidak Langsung	Jumlah Dokumen Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Belanja Tidak Langsung	12 Dokumen
Kepala Sub Bidang Belanja Langsung			
1	Tersedianya Dokumen Belanja Langsung	Jumlah Dokumen Perbendaharaan Belanja Langsung	12 Dokumen
Plt. Kepala Sub Bidang Kas Umum Daerah			
1	Tersedianya Dokumen Kas Umum Daerah	Jumlah Dokumen Kas Umum Daerah	12 Dokumen

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator / Pengawas Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026

Tabel diatas menggambarkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target pada Bidang Perbendaharaan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan perbendaharaan yang sesuai dengan ketentuan, yang diukur melalui ketersediaan dokumen pengelolaan perbendaharaan. Pada level sub bidang dan substansi, capaian kinerja difokuskan pada tersedianya berbagai dokumen pendukung, antara lain dokumen analisis keuangan pusat dan daerah untuk belanja tidak langsung, dokumen perbendaharaan belanja langsung, serta dokumen kas umum daerah. Masing-masing indikator kinerja tersebut ditetapkan dengan target yang sama, yaitu sebanyak 12 dokumen dalam satu periode pelaporan. Hal ini mencerminkan konsistensi dan komitmen Bidang Perbendaharaan dalam memastikan tersedianya dokumen secara tepat waktu dan sesuai standar, guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3. Program dan Kegiatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang untuk mencapai kinerja yang diharapkan melakukan program dan kegiatan yakni, sebagai berikut:

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening	Pagu
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	22.282.413.057
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	350.594.000
5.02.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.846.000
5.02.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	51.428.000
5.02.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	20.810.000
5.02.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.505.000
5.02.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	18.740.000
5.02.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	110.265.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.991.546.849
5.02.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.921.546.849
5.02.01.2.02.0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000
5.02.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	20.000.000
5.02.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	20.000.000
5.02.01.2.02.0	Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosisRealisasi	10.000.000
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	77.585.000
5.02.01.2.03.0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	37.425.000
5.02.01.2.03.0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.160.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening	Pagu
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.658.000
5.02.01.2.05.0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000
5.02.01.2.05.0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
5.02.01.2.05.0	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000
5.02.01.2.05.0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000
5.02.01.2.05.0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	73.708.000
5.02.01.2.05.0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47.950.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.859.273.311
5.02.01.2.06.0	Penyediaan Komponen Instalasi	11.498.300
5.02.01.2.06.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.645.011
5.02.01.2.06.0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.599.400
5.02.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000
5.02.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	735.768.500
5.02.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	4.440.000
5.02.01.2.06.0	Penyediaan Bahan/Material	371.327.100
5.02.01.2.06.0	Fasilitas Kunjungan Tamu	299.258.000
5.02.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.737.000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	15.287.919
5.02.01.2.07.0	Pengadaan Mebel	15.287.919
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	889.675.478
5.02.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.450.000
5.02.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.612.582
5.02.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	603.612.896
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	10.941.792.500
5.02.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	10.846.002.500
5.02.01.2.09.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.090.000
5.02.01.2.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	31.700.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.840.878.854
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.370.220.954
5.02.02.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	166.992.500
5.02.02.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan	252.639.276
5.02.02.2.01.0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	177.835.000
5.02.02.2.01.0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-	251.240.000
5.02.02.2.01.0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	37.837.500
5.02.02.2.01.0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-	249.690.000
5.02.02.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	549.125.000
5.02.02.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	684.861.678
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.363.543.500
5.02.02.2.02.0	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	377.742.000
5.02.02.2.02.0	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,	330.497.000
5.02.02.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	139.200.000
5.02.02.2.02.0	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang	158.677.500
5.02.02.2.02.0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	208.800.000
5.02.02.2.02.0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	30.627.000
5.02.02.2.02.0	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	118.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening	Pagu
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	747.714.400
5.02.02.2.03.0	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	61.500.000
5.02.02.2.03.0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	74.955.000
5.02.02.2.03.0	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	164.634.400
5.02.02.2.03.0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	273.945.000
5.02.02.2.03.0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	172.680.000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	5.024.400.000
5.02.02.2.04.0	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	24.400.000
5.02.02.2.04.0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi	335.000.000
5.02.02.2.05.0	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi	335.000.000
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.000.585.500
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.000.585.500
5.02.03.2.01.0	Penyusunan Standar Harga	120.640.000
5.02.03.2.01.0	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	40.320.000
5.02.03.2.01.0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	310.952.500
5.02.03.2.01.0	Pengamanan Barang Milik Daerah	238.336.500
5.02.03.2.01.0	Penilaian Barang Milik Daerah	94.720.000
5.02.03.2.01.0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	56.970.000
5.02.03.2.01.0	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik	89.640.000
5.02.03.2.01.0	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	39.750.000
5.02.03.2.01.0	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	9.256.500
Jumlah		33.123.877.411

Tabel 6. Program dan Kegiatan

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Berdasarkan Tabel 6. Program dan Kegiatan, BKAD Kota Kupang pada Tahun Anggaran 2026 menetapkan tiga program utama dengan total pagu anggaran sebesar Rp33.123.877.411, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp22.282.413.057, Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp9.840.878.854, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp1.000.585.500. Struktur program tersebut menunjukkan bahwa prioritas anggaran BKAD tidak hanya diarahkan pada pelaksanaan fungsi teknis pengelolaan keuangan dan aset, tetapi juga pada penguatan kapasitas administrasi dan dukungan operasional organisasi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki porsi terbesar, terutama untuk administrasi keuangan perangkat daerah berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN, administrasi umum, pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta perencanaan dan evaluasi kinerja. Sementara itu, Program Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan pada

siklus pengelolaan keuangan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan KUA-PPAS, RKA/DPA, pengelolaan kas dan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan kewenangan keuangan, hingga implementasi dan pemeliharaan sistem informasi. Adapun Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mencakup penyusunan standar harga dan standar barang, penatausahaan, pengamanan, penilaian, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan, rekonsiliasi, penyusunan laporan, serta pembinaan pengelolaan BMD. Dengan demikian, komposisi program dan kegiatan dalam Tabel 6 mencerminkan pendekatan yang terintegrasi antara dukungan operasional organisasi, penguatan tata kelola keuangan, transformasi pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi, dan optimalisasi aset daerah, yang secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan, hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisa terhadap pengukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan dan menghitung secara sistematis

3.1. Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah selama Triwulan II Tahun 2026 sesuai dengan target yang ditetapkan sampai dengan Triwulan II belum terealisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI				% CAPAIAN			
						TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH													
Kepala Badan													
1	Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif berbasis digital		- Opini BPK atas laporan keuangan	Opini	WTP	-	WTP	-	-	-	100,00	-	-
			- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	A	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	5,15	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Indeks Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (e-TPD)	Indeks	Digital	-	Digital	-	-	-	100,00	-	-
			- Nilai Kontribusi Aset Daerah terhadap PAD	Persentase	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		- Skor Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Nilai	12,03	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	Nilai	16	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan	Nilai	13,70	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Nilai Penyerapan Anggaran	Nilai	14,70	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Nilai Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	13,66	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis digital		- Nilai Aspek Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Nilai	100	-	100	-	-	-	100,00	-	-
			- Nilai Aspek Realisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Nilai	77,5	-	82,50	-	-	-	106,45	-	-
			- Nilai Aspek Lingkungan Strategis Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Nilai	100	-	90,00	-	-	-	90,00	-	-
	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang Produktif dan Bermilai Tambah		- Presentase Aset Tanah yang Bersertifikat (Persentase)	Persentase	58	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 7. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sumber: Perjanjian Kinerja BKAD Kota Kupang 2025-2029

Berdasarkan Tabel 7, capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran strategis organisasi telah berjalan sesuai dengan arah dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sasaran strategis BKAD diarahkan pada peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan berbasis digital, yang dijabarkan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis digital, serta peningkatan pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah. Pada periode Triwulan II, beberapa indikator kinerja telah menunjukkan realisasi, sementara sebagian indikator lainnya belum memiliki realisasi karena pengukurannya bersifat tahunan atau menunggu hasil evaluasi pada periode tertentu.

Pada sasaran peningkatan efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis digital, capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang cukup terukur. Nilai Aspek Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terealisasi sebesar 100,00 sesuai dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya, Nilai Aspek Realisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah mencapai 106,45, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 77,50. Sementara itu, Nilai Aspek Lingkungan Strategis Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terealisasi sebesar 90,00 dari target 100. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi dan realisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah telah berjalan, meskipun masih terdapat aspek lingkungan strategis yang perlu terus diperkuat untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, indikator seperti Opini BPK atas Laporan Keuangan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Akses Keuangan Daerah, Nilai Kontribusi Aset Daerah terhadap PAD, Skor Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan, Nilai Penyerapan Anggaran, dan Nilai Kondisi Keuangan Daerah belum menunjukkan realisasi pada tabel sampai dengan Triwulan II. Hal ini perlu dipahami sesuai karakteristik masing-masing indikator, karena beberapa indikator merupakan ukuran yang hasil pengukurannya diperoleh pada akhir periode atau berdasarkan evaluasi dan penilaian tertentu. Dengan demikian, belum adanya angka realisasi pada Triwulan II tidak serta-merta menunjukkan tidak terlaksananya kegiatan, tetapi menunjukkan bahwa indikator tersebut belum dapat diukur atau belum menghasilkan nilai pada periode pelaporan ini.

Pada sasaran peningkatan pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah, indikator yang digunakan adalah persentase aset tanah yang bersertifikat dengan target sebesar 58 persen. Sampai dengan Triwulan II, tabel belum mencantumkan realisasi atas indikator

tersebut. Oleh karena itu, pencapaian sasaran pengelolaan aset masih perlu terus didorong melalui kegiatan penatausahaan, pengamanan, sertifikasi, pemanfaatan, serta optimalisasi Barang Milik Daerah agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, Tabel 7 memperlihatkan bahwa pelaksanaan kinerja BKAD Kota Kupang pada Triwulan II Tahun 2026 telah memberikan hasil terutama pada aspek elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, sedangkan indikator strategis lainnya masih dalam proses pengukuran atau pelaksanaan secara bertahap. Capaian tersebut menjadi dasar bagi BKAD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan, memperkuat koordinasi antarbidang, serta memastikan setiap program dan kegiatan mendukung pencapaian target kinerja tahunan. Dengan demikian, hasil pengukuran Triwulan II tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah pada triwulan berikutnya.

3.2. Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Eslon III dan IV)

Capaian kinerja Pejabat Administrator (Eslon III dan IV) merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang secara keseluruhan. Pengukuran kinerja pejabat administrator dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang maupun sekretariat sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Melalui pengukuran ini, dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan, serta penyediaan dokumen administrasi, keuangan, anggaran, aset, dan perbendaharaan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian kinerja pada setiap unit kerja di lingkungan BKAD Kota Kupang difokuskan pada penyediaan dokumen, laporan, serta pengelolaan administrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengukuran capaian kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2026, secara umum seluruh pejabat administrator dan pengawas telah melaksanakan tugas sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran kinerja untuk masing-masing Pejabat Administrator tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Esl. III dan IV) Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

SEKRETARIAT												
Sekretaris												
1	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah		- Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	-	-	-	75,50	-	-
Kasubag Umum dan Kepegawaian												
1	Tersedianya Dokumen Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan												
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-

Berdasarkan Tabel 8. Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III dan IV) Sekretariat BKAD Kota Kupang, kinerja Sekretariat pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan pelaksanaan tugas yang tetap berjalan sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Pengukuran kinerja Sekretariat diarahkan pada peningkatan tata kelola perangkat daerah, khususnya melalui penyediaan dokumen umum dan kepegawaian serta dokumen perencanaan dan keuangan. Pada indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah, target yang ditetapkan adalah BB, dengan realisasi BB dan capaian 75,50 sebagaimana tercantum dalam tabel. Sementara itu, indikator Jumlah Dokumen Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki target 12 dokumen, dengan realisasi Triwulan I sebanyak 3 dokumen dan Triwulan II sebanyak 3 dokumen, masing-masing menunjukkan capaian 25,00%; demikian pula Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah dengan target 12 dokumen, realisasi 3 dokumen pada Triwulan I dan 3 dokumen pada Triwulan II, dengan capaian masing-masing 25,00%. Dengan demikian, apabila dilihat secara kumulatif sampai dengan Triwulan II, kedua indikator dokumentasi tersebut telah mencapai 6 dari target 12 dokumen atau 50% target tahunan, yang menunjukkan adanya kesinambungan pelaksanaan tugas Sekretariat dari Triwulan I ke Triwulan II. Capaian tersebut menggambarkan bahwa fungsi administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan terus dilaksanakan sebagai bagian dari dukungan manajemen terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas BKAD.

Untuk perbandingan dengan Triwulan I 2026, tidak terdapat perubahan jumlah realisasi pada masing-masing indikator antara Triwulan I dan Triwulan II, karena pada kedua triwulan tercatat realisasi 3 dokumen dengan capaian 25,00% per triwulan. Artinya, capaian Triwulan II perlu dipahami sebagai bagian dari akumulasi target tahunan, sehingga secara kumulatif realisasi mencapai 6 dokumen atau 50% dari target 12 dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Sekretariat berlangsung secara periodik dan konsisten, sedangkan indikator

SAKIP memiliki karakteristik pengukuran yang berbeda karena predikatnya merupakan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah. Secara keseluruhan, Tabel 8 memperlihatkan bahwa Sekretariat BKAD telah menjalankan fungsi dukungan administrasi secara berkesinambungan, terutama dalam penyediaan dokumen umum dan kepegawaian serta dokumen perencanaan dan keuangan, yang menjadi instrumen penting dalam menunjang tertib administrasi, perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta akuntabilitas kinerja organisasi.

Tabel 9. Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Esl. III dan IV) Bidang Akuntansi dan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

BIDANG AKUNTANSI DAN ASET												
Kepala Bidang Akuntansi dan Aset												
1	Terwujudnya Pelaporan Keuangan sesuai aturan yang berlaku	- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Laporan BMD Pemerintah Daerah	Laporan	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
Kasubbid Pelaporan Keuangan												
1	Tersedianya Laporan Keuangan	- Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset												
1	Tersedianya Dokumen Optimalisasi Barang Milik Daerah	- Jumlah Dokumen Pemanfaatan Aset	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
		- Jumlah Dokumen Pemindahtanganan Aset	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
		- Jumlah Dokumen Penghapusan Aset	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
		- Jumlah Dokumen Pengamanan Aset	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
Kasubbid Pencatatan Aset												
1	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
		- Jumlah Laporan Standar Satuan Harga	Laporan	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-

Berdasarkan Tabel 9. Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III dan IV) Bidang Akuntansi dan Aset BKAD Kota Kupang, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa seluruh indikator pada bidang tersebut telah direalisasikan secara konsisten sesuai target triwulanan. Pada tingkat Kepala Bidang Akuntansi dan Aset, sasaran Terwujudnya Pelaporan Keuangan sesuai aturan yang berlaku direalisasikan melalui penyusunan 3 laporan keuangan pemerintah daerah dari target tahunan 12 laporan, dengan capaian 25,00% pada Triwulan II. Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah juga terealisasi melalui 3 laporan BMD dari target 12 laporan, dengan capaian 25,00%. Pada Kasubbid Pelaporan Keuangan, indikator Jumlah Laporan Keuangan terealisasi sebanyak 3 laporan atau 25,00%. Selanjutnya, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset merealisasikan masing-masing 3 dokumen untuk pemanfaatan aset, pemindahtanganan aset, penghapusan aset, dan pengamanan aset, masing-masing dengan capaian 25,00%. Sementara itu, Kasubbid Pencatatan Aset merealisasikan 3 laporan Barang Milik Daerah dan 3 laporan Standar Satuan Harga, masing-masing sebesar 25,00%. Dengan demikian, pelaksanaan kinerja Bidang Akuntansi dan Aset pada Triwulan II diarahkan pada

kesinambungan penyediaan laporan keuangan serta dokumen pengelolaan dan penatausahaan aset untuk mendukung pengelolaan keuangan dan BMD yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, capaian kinerja Bidang Akuntansi dan Aset menunjukkan pola realisasi yang konsisten. Pada Triwulan I, seluruh indikator juga telah direalisasikan sebanyak 3 laporan/dokumen dari target tahunan 12, sehingga masing-masing memperoleh capaian 25,00%. Kondisi tersebut berlanjut pada Triwulan II, dengan tambahan realisasi sebanyak 3 laporan/dokumen pada setiap indikator dan capaian triwulanan tetap sebesar 25,00%. Dengan demikian, secara kumulatif sampai dengan Triwulan II, setiap indikator yang memiliki target 12 laporan/dokumen telah mencapai 6 laporan/dokumen atau 50,00% dari target tahunan. Secara substantif, tidak terdapat perubahan jenis indikator antara Triwulan I dan Triwulan II; perbedaannya terletak pada bertambahnya realisasi dari 3 menjadi 6 laporan/dokumen secara kumulatif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pada Bidang Akuntansi dan Aset berlangsung secara berkesinambungan, baik dalam penyusunan laporan keuangan dan BMD maupun dalam penyediaan dokumen pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengamanan, serta penatausahaan aset daerah.

Tabel 10. Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Esl. III dan IV) Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

BIDANG ANGGARAN												
Kepala Bidang Anggaran												
1	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran sesuai aturan yang berlaku	- Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah dan Bantuan Sosial												
1	Tersedianya Dokumen Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial	- Jumlah Dokumen Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
Kasubid Penyusunan Anggaran Belanja Langsung												
1	Tersedianya Dokumen Anggaran Belanja Langsung	- Jumlah Dokumen Anggaran Belanja Langsung	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
1	Tersedianya Dokumen Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembayaan	- Jumlah Dokumen Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembayaan	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-

Berdasarkan Tabel 10, capaian kinerja Pejabat Administrator dan Pengawas pada Bidang Anggaran BKAD Kota Kupang selama Triwulan II Tahun 2026 diarahkan pada terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tersedianya berbagai dokumen penganggaran sebagai instrumen pendukung perencanaan dan pelaksanaan APBD. Pada tingkat Kepala Bidang Anggaran, sasaran Terwujudnya Pengelolaan Anggaran sesuai aturan yang berlaku direalisasikan melalui penyediaan 3 dokumen Anggaran Pemerintah Daerah dari target tahunan 12 dokumen, dengan capaian 25,00% pada Triwulan II. Selanjutnya,

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah dan Bantuan Sosial melaksanakan sasaran Tersedianya Dokumen Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial melalui penyediaan 3 dokumen dari target 12 dokumen atau capaian 25,00%. Pada Kasubbid Penyusunan Anggaran Belanja Langsung, sasaran Tersedianya Dokumen Anggaran Belanja Langsung juga terealisasi sebanyak 3 dokumen dengan capaian 25,00%, sedangkan dokumen anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan pada jabatan terkait juga menunjukkan realisasi 3 dokumen dari target 12 dokumen atau 25,00%. Dengan demikian, pelaksanaan kinerja Bidang Anggaran pada Triwulan II menunjukkan kesinambungan dalam penyediaan dokumen penganggaran, baik dokumen anggaran pemerintah daerah secara umum maupun dokumen yang berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial, belanja langsung, serta belanja tidak langsung dan pembiayaan.

Dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, capaian kinerja Bidang Anggaran pada Triwulan II menunjukkan pola yang konsisten, yaitu setiap indikator memiliki target tahunan sebanyak 12 dokumen dengan realisasi 3 dokumen pada Triwulan I dan kembali 3 dokumen pada Triwulan II, masing-masing dengan capaian 25,00% per triwulan. Dengan demikian, secara kumulatif sampai dengan Triwulan II, setiap indikator telah menghasilkan 6 dokumen atau 50,00% dari target tahunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pada Bidang Anggaran berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan sesuai periode pengukuran kinerja. Tidak terdapat perubahan target maupun jenis indikator antara Triwulan I dan Triwulan II yang ditunjukkan dalam tabel; peningkatan capaian terutama terlihat pada akumulasi realisasi dokumen dari 3 menjadi 6 dokumen. Hal tersebut mencerminkan keberlanjutan pelaksanaan fungsi penganggaran dalam mendukung penyusunan dan pengelolaan APBD secara tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 11. Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Esl. III dan IV) Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

BIDANG PERBENDAHARAAN												
Kepala Bidang Perbendaharaan												
1	Terwujudnya Pengelolaan Perbendaharaan sesuai aturan yang berlaku	- Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan sesuai aturan yang berlaku	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
Kasubbid Kas Umum Daerah												
1	Tersedianya Dokumen Kas Umum Daerah	- Jumlah Dokumen Kas Umum Daerah	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Belanja Tidak Langsung												
1	Tersedianya Dokumen Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Belanja Tidak Langsung	- Jumlah Dokumen Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Belanja Tidak Langsung	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-
Kasubbid Belanja Langsung												
1	Tersedianya Dokumen Perbendaharaan Belanja Langsung	- Jumlah Dokumen Perbendaharaan Belanja Langsung	Dokumen	12	3	3	-	-	25,00	25,00	-	-

Tabel 11 menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja pada Bidang Perbendaharaan selama Triwulan II Tahun 2026 tetap berjalan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Terdapat empat indikator kinerja, yaitu pengelolaan perbendaharaan sesuai ketentuan, penyediaan dokumen Kas Umum Daerah, penyediaan dokumen analisis keuangan belanja tidak langsung, serta penyediaan dokumen perbendaharaan belanja langsung. Masing-masing indikator memiliki target 12 dokumen/laporan dalam satu tahun, dengan realisasi 3 dokumen pada Triwulan I dan 3 dokumen pada Triwulan II, sehingga masing-masing triwulan memberikan capaian sebesar 25,00%.

Pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026, seluruh indikator pada Bidang Perbendaharaan menunjukkan pola capaian yang sama, yaitu realisasi sebanyak 3 dokumen atau 25,00% pada masing-masing triwulan. Dengan demikian, sampai dengan akhir Triwulan II telah terealisasi 6 dokumen dari target tahunan 12 dokumen atau 50,00% pada setiap indikator. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Bidang Perbendaharaan pada semester pertama berlangsung secara konsisten dan sesuai dengan target periodik yang ditetapkan dalam dokumen kinerja.

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang pada Tahun Anggaran 2026. Melalui realisasi anggaran, dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan serta tingkat penyerapan anggaran yang telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pada Triwulan II Tahun 2026, BKAD Kota Kupang melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi anggaran pada periode ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan operasional, administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, serta kegiatan pendukung lainnya yang menjadi tanggung jawab masing-masing bidang dan sekretariat di lingkungan BKAD Kota Kupang. Tingkat realisasi anggaran juga menjadi bahan evaluasi

terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan II guna mendukung peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.

Adapun rincian realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang selama Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Triwulan II Tahun 2026

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening	Pagu	Realisasi s.d. Bulan Ini	%
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	22.282.413.057	10.136.749.86	45.49%
5.02.012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	350.594.000	112.627.459	32.12%
5.02.012.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.846.000	47.904.457	42.08%
5.02.012.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	51.428.000		
5.02.012.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	20.810.000		
5.02.012.01.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.505.000		
5.02.012.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	18.740.000		
5.02.012.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	110.265.000	64.723.002	58.7%
5.02.012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.991.546.849	3.405.498.217	42.61%
5.02.012.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.921.546.849	3.368.618.217	42.52%
5.02.012.02.0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000		
5.02.012.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	20.000.000	20.000.000	100.0%
5.02.012.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	20.000.000	16.880.000	84.4%
5.02.012.02.0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	10.000.000		
5.02.012.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	77.585.000	1.940.800	2.5%
5.02.012.03.0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	37.425.000	983.300	2.63%
5.02.012.03.0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.160.000	957.500	2.38%
5.02.012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.658.000	27.652.000	17.65%
5.02.012.05.0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000		
5.02.012.05.0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
5.02.012.05.0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000	14.960.000	99.73%
5.02.012.05.0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000		
5.02.012.05.0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	73.708.000	12.692.000	17.22%
5.02.012.05.0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47.950.000		
5.02.012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.859.273.311	747.830.367	40.22%
5.02.012.06.0	Penyediaan Komponen Instalasi	11.498.300	4.660.500	40.53%
5.02.012.06.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.645.011	135.154.350	73.2%
5.02.012.06.0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.599.400	16.370.600	31.12%
5.02.012.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	7.200.000	60.0%
5.02.012.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	735.768.500	270.136.500	36.71%
5.02.012.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	4.440.000		
5.02.012.06.0	Penyediaan Bahan/Material	371.327.100	150.322.900	40.48%
5.02.012.06.0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	299.258.000	78.991.550	26.4%
5.02.012.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.737.000	84.993.967	45.27%
5.02.012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	15.287.919		
5.02.012.07.0	Pengadaan Mebel	15.287.919		
5.02.012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	889.675.478	225.446.915	25.34%
5.02.012.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.450.000	5.047.000	17.14%
5.02.012.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.612.582	99.015.915	38.59%
5.02.012.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	603.612.896	121.384.000	20.11%
5.02.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	10.941.792.500	5.615.754.110	51.32%
5.02.012.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	10.846.002.500	5.593.531.110	51.57%
5.02.012.09.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.090.000	12.595.000	19.65%
5.02.012.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	31.700.000	9.628.000	30.37%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening	Pagu	Realisasi s.d. Bulan Ini	%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.840.878.854	2.748.673.731	27.93%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.370.220.954	435.169.910	18.36%
5.02.02.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	166.992.500		
5.02.02.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan	252.639.276		
5.02.02.2.01.0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	177.835.000	81.573.900	45.87%
5.02.02.2.01.0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-	251.240.000	78.320.000	31.17%
5.02.02.2.01.0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	37.837.500		
5.02.02.2.01.0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-	249.690.000		
5.02.02.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	549.125.000		
5.02.02.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	684.861.678	275.276.010	40.19%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.363.543.500	544.122.500	39.91%
5.02.02.2.02.0	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	377.742.000	98.616.000	26.11%
5.02.02.2.02.0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,	330.497.000	187.775.000	56.82%
5.02.02.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	139.200.000	58.470.000	42.0%
5.02.02.2.02.0	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang	158.677.500	112.916.400	71.16%
5.02.02.2.02.0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	208.800.000	78.100.000	37.4%
5.02.02.2.02.0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	30.627.000	8.245.100	26.92%
5.02.02.2.02.0	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	118.000.000		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	747.714.400	118.381.321	15.83%
5.02.02.2.03.0	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	61.500.000		
5.02.02.2.03.0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	74.955.000	810.000	1.08%
5.02.02.2.03.0	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	164.634.400		
5.02.02.2.03.0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	273.945.000	113.349.321	41.38%
5.02.02.2.03.0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	172.680.000	4.222.000	2.44%
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	5.024.400.000	1.621.000.000	32.26%
5.02.02.2.04.0	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	24.400.000		
5.02.02.2.04.0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000	1.621.000.000	32.42%
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi	335.000.000	30.000.000	8.96%
5.02.02.2.05.0	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi	335.000.000	30.000.000	8.96%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.000.585.500	195.136.300	19.5%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.000.585.500	195.136.300	19.5%
5.02.03.2.01.0	Penyusunan Standar Harga	120.640.000	53.530.000	44.37%
5.02.03.2.01.0	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	40.320.000		
5.02.03.2.01.0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	310.952.500	43.965.100	14.14%
5.02.03.2.01.0	Pengamanan Barang Milik Daerah	238.336.500	27.383.200	11.49%
5.02.03.2.01.0	Penilaian Barang Milik Daerah	94.720.000		
5.02.03.2.01.0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	56.970.000		
5.02.03.2.01.0	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik	89.640.000	67.378.000	75.17%
5.02.03.2.01.0	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	39.750.000	2.880.000	7.25%
5.02.03.2.01.0	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	9.256.500		
Jumlah		33.123.877.411	13.080.559.89	39.49%

Sumber data: SPJ Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Tabel 12 menggambarkan perkembangan realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2026. Tabel ini memuat tiga program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, beserta kegiatan dan subkegiatan di dalamnya. Realisasi yang ditampilkan merupakan realisasi kumulatif sampai dengan bulan pelaporan, sehingga perbandingan Triwulan I dan Triwulan II perlu dipahami sebagai perkembangan akumulatif, bukan hanya belanja yang terjadi khusus selama Triwulan II. Pada Triwulan I, total realisasi tercatat sebesar Rp6.257.489.898, sedangkan pada Triwulan II meningkat menjadi Rp13.080.559.893.

Pada Triwulan II, total pagu yang tercantum dalam Tabel 12 sebesar Rp33.123.877.411, dengan realisasi kumulatif Rp13.080.559.893 atau 39,49%. Sementara pada Triwulan I, dengan

pagu yang sama, realisasi kumulatif baru mencapai Rp6.257.489.898. Dengan demikian, selama periode dari Triwulan I ke Triwulan II terjadi tambahan realisasi sebesar Rp6.823.069.995, atau meningkat sekitar 109,04% dibandingkan realisasi kumulatif Triwulan I.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa memasuki semester pertama tahun anggaran 2026, pelaksanaan program dan kegiatan BKAD telah mengalami peningkatan penyerapan anggaran yang cukup besar. Persentase realisasi keseluruhan meningkat dari sekitar 18,89% pada Triwulan I menjadi 39,49% pada Triwulan II, atau bertambah sekitar 20,60 poin persentase.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program dengan pagu terbesar, yaitu Rp22.282.413.057. Pada Triwulan I, realisasi program ini sebesar Rp4.559.691.058 atau 20,46%. Pada Triwulan II, realisasi kumulatif meningkat menjadi Rp10.136.749.864 atau 45,49%. Dengan demikian, terdapat tambahan realisasi sebesar Rp5.577.058.806 dan peningkatan persentase sebesar 25,03 poin persentase.

Perkembangan tersebut terutama didukung oleh beberapa kegiatan yang mempunyai nilai anggaran relatif besar. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meningkat dari realisasi Rp1.701.993.697 atau 21,30% pada Triwulan I menjadi Rp3.405.498.217 atau 42,61% pada Triwulan II. Komponen terbesar di dalamnya adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pada Triwulan II telah mencapai Rp3.368.618.217 atau 42,52% dari pagunya.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah juga menunjukkan perkembangan yang cukup nyata. Pada Triwulan I realisasinya sebesar Rp157.310.890 atau 8,46%, sedangkan pada Triwulan II meningkat menjadi Rp747.830.367 atau 40,22%. Kenaikan ini terlihat pada sejumlah subkegiatan, antara lain penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, bahan/material, barang cetakan dan penggandaan, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Kegiatan yang paling besar kontribusinya terhadap realisasi Program Penunjang adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Realisasi meningkat dari Rp2.575.343.201 atau 23,54% pada Triwulan I menjadi Rp5.615.754.110 atau 51,32% pada Triwulan II. Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan memberikan kontribusi terbesar, dengan realisasi Rp5.593.531.110 atau 51,57%.

Dengan demikian, peningkatan realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Triwulan II terutama berkaitan dengan meningkatnya pelaksanaan belanja rutin, administrasi keuangan, administrasi umum, serta pemeliharaan barang milik daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan pendukung operasional organisasi mulai memasuki tahap pelaksanaan yang lebih intensif setelah pada Triwulan I sebagian kegiatan masih berada dalam tahap awal.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pagu sebesar Rp9.840.878.854. Pada Triwulan I, realisasi kumulatif mencapai Rp1.618.100.840 atau 16,44%. Pada Triwulan II realisasi meningkat menjadi Rp2.748.673.731 atau 27,93%. Dengan demikian, terdapat tambahan realisasi sebesar Rp1.130.572.891, sedangkan persentase realisasi meningkat sekitar 11,49 poin persentase.

Pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, realisasi meningkat dari Rp180.030.000 atau 7,60% pada Triwulan I menjadi Rp435.169.910 atau 18,36% pada Triwulan II. Beberapa subkegiatan mulai menunjukkan realisasi, antara lain koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD sebesar 45,87%, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD sebesar 31,17%, serta penyusunan Peraturan Daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebesar 40,19%.

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah mengalami peningkatan dari Rp269.555.800 atau 19,77% pada Triwulan I menjadi Rp544.122.500 atau 39,91% pada Triwulan II. Di dalam kegiatan tersebut, beberapa subkegiatan menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi, khususnya koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang telah mencapai 71,16%, koordinasi/fasilitasi/asistensi/sinkronisasi/supervisi sebesar 56,82%, serta koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan sebesar 42,00%.

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan juga meningkat dari Rp43.515.040 atau 5,82% pada Triwulan I menjadi Rp118.381.321 atau 15,83% pada Triwulan II. Peningkatan terutama berasal dari konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang mencapai Rp113.349.321 atau 41,38%.

Perkembangan yang cukup besar terlihat pada kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meningkat dari Rp1.110.000.000 atau 22,09% pada Triwulan I menjadi Rp1.621.000.000 atau 32,26% pada Triwulan II. Realisasi tersebut terutama berasal dari subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, yang mencapai

Rp1.621.000.000 atau 32,42%. Sementara itu, kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi meningkat dari 4,48% menjadi 8,96%.

Dengan demikian, Program Pengelolaan Keuangan Daerah memperlihatkan perkembangan yang lebih bertahap dibandingkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut tercermin dari realisasi 27,93% pada Triwulan II. Beberapa kegiatan teknis telah mengalami peningkatan, tetapi masih terdapat subkegiatan yang belum menunjukkan realisasi atau masih relatif rendah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki pagu Rp1.000.585.500. Pada Triwulan I, realisasi mencapai Rp79.698.000 atau 7,97%. Pada Triwulan II, realisasi meningkat menjadi Rp195.136.300 atau 19,50%. Dengan demikian, terjadi tambahan realisasi sebesar Rp115.438.300 atau peningkatan sekitar 11,53 poin persentase.

Peningkatan tersebut antara lain berasal dari Penyusunan Standar Harga, yang pada Triwulan II telah mencapai Rp53.530.000 atau 44,37%. Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah meningkat menjadi Rp43.965.100 atau 14,14%, sedangkan Pengamanan Barang Milik Daerah mencapai Rp27.383.200 atau 11,49%.

Subkegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tetap menjadi salah satu subkegiatan dengan tingkat realisasi relatif tinggi, yaitu Rp67.378.000 atau 75,17%. Sementara itu, penyusunan laporan barang milik daerah mencapai Rp2.880.000 atau 7,25%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan BMD telah bergerak dari tahap awal pada Triwulan I menuju pelaksanaan yang lebih aktif pada Triwulan II, meskipun secara keseluruhan persentase program masih sebesar 19,50%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis pelaksanaan program, kegiatan, serta capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan, sasaran strategis, Perjanjian Kinerja, serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kinerja diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berbasis digital. Hal tersebut sejalan dengan tugas BKAD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan.

Pelaksanaan kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan adanya kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Pada sejumlah indikator yang pengukurannya dilakukan secara periodik, capaian menunjukkan pola yang konsisten dengan target tahunan. Bidang Anggaran, misalnya, telah merealisasikan 3 dokumen pada Triwulan II dari target tahunan sebanyak 12 dokumen pada masing-masing indikator, sehingga secara kumulatif sampai dengan Triwulan II telah mencapai 6 dokumen atau 50,00% dari target tahunan. Capaian tersebut meliputi dokumen anggaran pemerintah daerah, dokumen anggaran hibah dan bantuan sosial, dokumen anggaran belanja langsung, serta dokumen anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan.

Pada Bidang Perbendaharaan, seluruh indikator juga menunjukkan pelaksanaan yang konsisten. Masing-masing indikator memiliki target tahunan sebanyak 12 dokumen/laporan dan telah terealisasi 3 dokumen pada Triwulan I serta 3 dokumen pada Triwulan II. Dengan demikian, sampai dengan akhir Triwulan II telah terealisasi 6 dokumen atau 50,00% dari target tahunan pada setiap indikator. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, Kas Umum Daerah, analisis keuangan belanja tidak langsung, serta perbendaharaan belanja langsung telah berjalan secara periodik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada aspek pengelolaan keuangan daerah berbasis digital, capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Nilai Aspek Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah telah mencapai 100,00 sesuai dengan target. Nilai Aspek Realisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah mencapai 106,45, lebih tinggi dibandingkan

target sebesar 77,50. Sementara itu, Nilai Aspek Lingkungan Strategis Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah mencapai 90,00 dari target 100. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi dan realisasi elektronifikasi transaksi telah berjalan, namun aspek lingkungan strategis masih perlu diperkuat pada periode berikutnya.

Untuk indikator strategis lainnya, seperti Opini BPK atas Laporan Keuangan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Akses Keuangan Daerah, Nilai Kontribusi Aset Daerah terhadap PAD, Skor Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan, Nilai Penyerapan Anggaran, dan Nilai Kondisi Keuangan Daerah, belum terdapat realisasi pada tabel sampai dengan Triwulan II. Kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik indikator yang sebagian pengukurannya dilakukan pada akhir periode atau berdasarkan proses evaluasi dan penilaian tertentu. Oleh karena itu, belum adanya angka realisasi pada periode ini tidak serta-merta menunjukkan tidak terlaksananya kegiatan, melainkan menunjukkan bahwa indikator tersebut belum dapat diukur atau belum menghasilkan nilai pada periode pelaporan.

Pada sasaran peningkatan pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah, indikator yang digunakan adalah persentase aset tanah yang bersertifikat dengan target sebesar 58%. Sampai dengan Triwulan II belum terdapat realisasi yang dicantumkan untuk indikator tersebut. Dengan demikian, pengelolaan aset masih memerlukan perhatian dan penguatan, khususnya melalui penatausahaan, pengamanan, sertifikasi, pemanfaatan, dan optimalisasi Barang Milik Daerah agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir Tahun Anggaran 2026.

Dari sisi capaian kinerja pejabat administrator dan pengawas, secara umum pelaksanaan tugas pada Sekretariat, Bidang Akuntansi dan Aset, Bidang Anggaran, serta Bidang Perbendaharaan telah berjalan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Pada Bidang Anggaran, masing-masing indikator telah terealisasi 3 dokumen pada Triwulan II dan secara kumulatif mencapai 50,00% dari target tahunan. Demikian pula pada Bidang Perbendaharaan, seluruh indikator telah mencapai 50,00% secara kumulatif sampai dengan Triwulan II. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi pelaksanaan tugas dan kesinambungan penyediaan dokumen pendukung pengelolaan keuangan daerah.

Dari sisi pelaksanaan anggaran, sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2026, BKAD Kota Kupang memiliki total pagu anggaran sebesar Rp33.123.877.411 dengan realisasi kumulatif sebesar Rp13.080.559.893 atau 39,49%. Dibandingkan dengan Triwulan I yang mencapai Rp6.257.489.898 atau sekitar 18,89%, terjadi tambahan realisasi sebesar Rp6.823.069.995 atau sekitar 109,04%, sehingga persentase realisasi meningkat sekitar 20,60

poin persentase. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memasuki semester pertama telah mengalami perkembangan penyerapan anggaran yang cukup signifikan.

Realisasi anggaran tersebut berasal dari tiga program utama. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu Rp22.282.413.057 telah mencapai realisasi Rp10.136.749.864 atau 45,49%. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu Rp9.840.878.854 telah mencapai realisasi Rp2.748.673.731 atau 27,93%. Sementara itu, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu Rp1.000.585.500 telah mencapai realisasi Rp195.136.300 atau 19,50%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menjadi program dengan perkembangan realisasi paling besar, antara lain didukung oleh pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum, serta pemeliharaan Barang Milik Daerah. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah mencapai realisasi Rp5.615.754.110 atau 51,32%, sedangkan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan mencapai Rp5.593.531.110 atau 51,57%.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan perkembangan yang lebih bertahap. Beberapa kegiatan telah memperlihatkan realisasi yang cukup baik, antara lain koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah sebesar 71,16%, koordinasi/fasilitasi/asistensi/sinkronisasi/supervisi sebesar 56,82%, dan koordinasi serta penyusunan laporan realisasi penerimaan sebesar 42,00%. Namun demikian, masih terdapat sejumlah subkegiatan yang belum menunjukkan realisasi atau tingkat realisasinya masih relatif rendah.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah juga menunjukkan peningkatan dari Triwulan I ke Triwulan II. Realisasi meningkat dari Rp79.698.000 atau 7,97% menjadi Rp195.136.300 atau 19,50%. Beberapa subkegiatan telah menunjukkan perkembangan, antara lain Penyusunan Standar Harga sebesar 44,37%, Penatausahaan Barang Milik Daerah sebesar 14,14%, Pengamanan Barang Milik Daerah sebesar 11,49%, serta Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebesar 75,17%. Meskipun demikian, secara keseluruhan tingkat realisasi program masih perlu ditingkatkan pada triwulan berikutnya.

Dengan memperhatikan keseluruhan hasil tersebut, pelaksanaan kinerja BKAD Kota Kupang sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat dinilai telah berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan arah Perjanjian Kinerja. Kinerja yang telah terealisasi perlu dipertahankan, sedangkan indikator yang belum terealisasi atau masih rendah perlu mendapatkan perhatian lebih intensif melalui penguatan koordinasi, percepatan pelaksanaan

kegiatan, pengendalian realisasi anggaran, peningkatan kualitas pengelolaan aset, serta pemantauan secara berkala. Hasil pengukuran Triwulan II selanjutnya menjadi dasar pengendalian dan perbaikan kinerja pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang terarah dan terukur agar pencapaian target kinerja tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dapat dilaksanakan secara optimal. Rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pada periode berikutnya adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian pencapaian target kinerja secara berkala.

Setiap bidang dan sekretariat perlu melakukan pemantauan terhadap perkembangan indikator kinerja secara periodik, tidak hanya pada saat penyusunan laporan triwulanan. Monitoring perlu dilakukan terhadap target, realisasi, persentase capaian, serta kendala pelaksanaan sehingga potensi keterlambatan dapat diketahui dan ditindaklanjuti lebih awal. Hasil monitoring agar menjadi bahan evaluasi pimpinan dalam menentukan langkah percepatan dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

2. Mempertahankan konsistensi pencapaian kinerja Sekretariat, Bidang Anggaran, dan Bidang Perbendaharaan.

Capaian kumulatif 50,00% terhadap target tahunan pada sejumlah indikator menunjukkan pola pelaksanaan yang konsisten sampai dengan Triwulan II. Capaian tersebut perlu dipertahankan dengan memastikan penyusunan dokumen, laporan, dan administrasi dilaksanakan tepat waktu, lengkap, akurat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Memperkuat pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.

Capaian Nilai Aspek Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebesar 100,00 dan Nilai Aspek Realisasi sebesar 106,45 perlu dipertahankan dan dikembangkan. Pada saat yang sama, Nilai Aspek Lingkungan Strategis yang baru mencapai 90,00 dari target 100 perlu menjadi perhatian khusus. Penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antarperangkat daerah dan pihak terkait, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pemanfaatan sistem informasi, serta penguatan dukungan terhadap pelaksanaan transaksi pemerintah daerah secara elektronik.

4. Mempercepat pencapaian indikator pengelolaan aset daerah, khususnya sertifikasi aset tanah.

Target persentase aset tanah yang bersertifikat sebesar 58% perlu menjadi salah satu prioritas tindak lanjut. Untuk itu, perlu dilakukan pemutakhiran data aset tanah, identifikasi aset yang belum bersertifikat, penelusuran dan pemenuhan dokumen kepemilikan, koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta instansi pertanahan, dan penyusunan tahapan penyelesaian sertifikasi secara terukur. Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

5. Meningkatkan penatausahaan, pengamanan, pemanfaatan, dan optimalisasi Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan pengelolaan BMD perlu terus diperkuat secara menyeluruh mulai dari pencatatan, rekonsiliasi, pengamanan administrasi dan fisik, penilaian, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, sampai dengan penyusunan laporan BMD. Subkegiatan dengan realisasi masih rendah perlu diberikan perhatian khusus agar tidak menimbulkan penumpukan pelaksanaan pada akhir tahun anggaran. Hal ini juga diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran aset daerah yang produktif dan bernilai tambah.

6. Melakukan percepatan terhadap subkegiatan dengan tingkat realisasi anggaran yang masih rendah.

Berdasarkan realisasi Triwulan II, Program Pengelolaan Keuangan Daerah baru mencapai 27,93%, sedangkan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mencapai 19,50%. Oleh karena itu, masing-masing penanggung jawab kegiatan perlu melakukan identifikasi terhadap subkegiatan yang belum terealisasi atau realisasinya masih rendah, menetapkan langkah percepatan, serta menyusun jadwal pelaksanaan yang lebih terukur dengan tetap memperhatikan ketentuan pengadaan, administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan.

7. Meningkatkan koordinasi antarbidang dan perangkat daerah.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan proses yang saling berkaitan dan membutuhkan dukungan data serta dokumen dari berbagai perangkat daerah. Oleh sebab itu, koordinasi antara Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Aset, serta perangkat daerah terkait perlu terus diperkuat. Koordinasi tersebut terutama diarahkan pada sinkronisasi data, percepatan penyampaian dokumen, rekonsiliasi, penyelesaian permasalahan administrasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan.

8. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu rekonsiliasi serta pelaporan keuangan.

Rekonsiliasi data keuangan dan aset perlu dilakukan secara berkala agar perbedaan data dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Kualitas data yang akurat dan konsisten akan mendukung penyusunan laporan keuangan, laporan BMD, laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran, serta berbagai dokumen pertanggungjawaban secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

9. Mengoptimalkan realisasi anggaran dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Peningkatan realisasi anggaran dari 18,89% pada Triwulan I menjadi 39,49% pada Triwulan II perlu diikuti dengan pengendalian kualitas belanja. Percepatan penyerapan tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan persentase realisasi, tetapi harus tetap dikaitkan dengan pencapaian output dan outcome kegiatan, kesesuaian dengan perencanaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Meningkatkan pengendalian terhadap kegiatan yang memiliki pagu anggaran besar.

Kegiatan dengan pagu relatif besar perlu mendapatkan monitoring lebih intensif karena memiliki pengaruh signifikan terhadap keseluruhan realisasi anggaran BKAD. Pemantauan dapat dilakukan melalui penyusunan target realisasi per bulan atau per triwulan, evaluasi deviasi antara rencana dan realisasi, serta tindak lanjut terhadap kegiatan yang mengalami keterlambatan.

11. Memperkuat pengelolaan data dan implementasi sistem informasi.

Realisasi kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi pada Triwulan II tercatat sebesar 8,96%. Oleh karena itu, diperlukan perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut agar dukungan sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat berjalan lebih optimal. Penguatan sistem informasi juga perlu disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur, pemeliharaan sistem, keamanan data, dan konsistensi pemutakhiran informasi.

12. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi regulasi, pembinaan teknis, serta forum koordinasi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing bidang.

13. Meningkatkan kualitas dokumentasi dan eviden kinerja.

Setiap pelaksanaan kegiatan perlu didukung dengan dokumentasi dan bukti pelaksanaan yang lengkap, sistematis, dan mudah ditelusuri. Eviden kinerja yang tertib akan memudahkan proses monitoring, evaluasi, penyusunan laporan kinerja, serta proses penilaian terhadap indikator yang pengukurannya dilakukan secara periodik maupun tahunan.

14. Menyiapkan lebih awal pemenuhan data untuk indikator yang pengukurannya dilakukan secara tahunan.

Walaupun sejumlah indikator strategis belum memiliki realisasi pada Triwulan II karena proses pengukurannya dilakukan pada periode tertentu, data pendukung dan eviden pencapaian perlu dipersiapkan sejak awal. Dengan demikian, pada saat proses evaluasi atau pengukuran dilakukan, BKAD telah memiliki data yang lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

15. Melakukan evaluasi khusus terhadap indikator yang belum terealisasi atau belum dapat diukur.

Indikator yang belum memiliki realisasi pada Triwulan II perlu dipetakan berdasarkan status pengukurannya, apakah memang merupakan indikator tahunan, masih menunggu proses evaluasi, atau memerlukan dukungan kegiatan tertentu. Pemetaan tersebut penting agar tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi target pada akhir tahun dan agar setiap indikator memiliki rencana tindak lanjut yang jelas.

16. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Memasuki Triwulan III dan Triwulan IV, diperlukan pengawasan yang lebih intensif terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Setiap bidang perlu menyusun langkah tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II, termasuk menetapkan kegiatan prioritas, jadwal penyelesaian, penanggung jawab, serta indikator keberhasilan yang dapat dipantau secara berkala.

17. Menjadikan hasil Laporan Kinerja Triwulan II sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Laporan Kinerja Triwulan II tidak hanya dipergunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen manajemen untuk mengidentifikasi capaian, kesenjangan, hambatan, dan kebutuhan perbaikan. Hasil evaluasi tersebut perlu diintegrasikan ke dalam pelaksanaan Triwulan III dan IV sehingga terdapat kesinambungan antara hasil evaluasi dan tindakan perbaikan.

Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut secara konsisten, terkoordinasi, dan terukur, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Percepatan pelaksanaan kegiatan diharapkan tetap sejalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal serta memberikan dukungan yang semakin kuat terhadap tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berbasis digital.

Kupang, 3 Juli 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kupang

Jackson Jimmy A. Tunliu, SE.,MM

Pembina Tk. I

Nip. 19750405 200501 1 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan	